

4. SENIN PAHING, 16 AGUSTUS 1993

OPINI

BERNAS

# Kemerdekaan di Kampung

KATA orang bijak, tak ada pengalaman pribadi yang tak punya bobot sejarah sosial. Jadi tak perlu dibikin pertentangan antara apa yang pribadi dan apa yang sosial.

## Nostalgia pribadi

Kewibawaan kata-kata orang-orang bijak itu saya pinjam untuk bernostalgia tentang pengalaman pribadi merayakan acara 17 Agustusan sebelum berangkat dewasa. Tempatnya di sebuah perkampungan golongan kecil, di sebuah kota Jawa Timur. Waktunya tahun 1960-an.

Perayaan 17-Agustusan merupakan masa yang indah bagi kami, anak-anak di kampung itu. Di RT kami hampir setiap tahun diadakan berbagai acara rekreasi dan pesta yang mengisitewakan anak-anak. Bukan upacara, rapat, atau acara hiburan lain yang mungkin penting, tapi membosankan kami, anak-anak. Pokoknya acara 17-Agustusan bukanlah acara yang dikuasai orang-orang dewasa.

Di kampung itu orang-orang dewasa sibuk melayani dan menyenangkan kami. Mereka menyiapkan hiasan di kampung. Ada musik dari *loudspeaker*. Ada makan siang bersama, dan biasanya anak-anak diberi kesempatan makan duluan. Ada berbagai lomba. Ada hadiah sederhana bagi yang menang. Tetapi bukan nilai lahiriah hadiah itu yang menjadi pusat keasyikan kami, melainkan berbagai cerita dan prestasi

anak-anak yang berlomba.

Bahkan, beberapa minggu sesudah acara seperti itu selesai, kami masih memperbincangkan berbagai tingkah dan peristiwa lucu selama perayaan tahunan itu.

Tampaknya tak ada yang mewajibkan para orang tua kami untuk berbuat baik kepada anak-anak ini. Mereka tampaknya ikut senang menyaksikan anak-anak bergembira. Tidak semua kampung di sekitar perkampungan kami mengadakan acara seperti itu. Jelas acara di kampung kami bukan hasil instruksi seragam dari Lurah atau Camat.

Betapa bersyukurnya saya kepada para ibu dan para bapak di kampung itu bila mengingat semua pengalaman itu. Apalagi bila mengenangnya dari jauh pada masa ini. Betapa beruntungnya kami yang menjadi kanak-kanak pada waktu itu. Tentu saja kami tidak paham betul apa itu Proklamasi Kemerdekaan atau Nasionalisme, kecuali yang dipelajari secara resmi dari bangku sekolah.

Dua acara keramaian tahunan yang bisa menyaangi kemerdekaan acara 17-Agustusan adalah Idul Fitri dan Tahun Baru Imlek, yang biasanya disertai aneka pertunjukan tradisional bagi publik.

## Zaman Izin dan instruksi

Sudah 20 tahun saya meninggalkan kampung halaman dan provinsi Jawa Timur. Peristiwa

Ariel Heryanto

indah yang saya kisahkan itu berbaris atau petunjuk memasih lama tidak terjadi lagi di kampung halaman kami. Tetapi perubahan agaknya terjadi meluas di mana-mana secara instansi, dan tidak selalu datang dari wilayah kampung setempat. Surat-surat itu meraisa "berwenang" karena dibubuhki stempel gagah-gagah.

Maka hari-hari di awal bulan Agustus menjadi hari-hari yang terasa menekan bagi warga kampung, karena beban kewajiban moral maupun material. Acara 17-Agustusan menjadi acara yang selalu disponsori pemerintah, datang dari pusat dan atas. Ditunggu dan dipatuhi dari masyarakat di tingkat paling bawah. Bahkan untuk memilih warna cat pagar, atau memilih tempat sampah atau tiang bendera, warga kampung harus menunggu dan tinggal mematuhi petunjuk resmi dari bapak-bapak.

Memang sekarang pun di banyak kampung masih dapat dijumpai acara lomba dan rekreasi. Tetapi banyak dari acara itu diadakan bukan karena inisiatif penduduk setempat, melainkan memenuhi pesan, petunjuk, atau permintaan dari kepala RW, atau Lurah, atau apparatur pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Awal bulan Agustus adalah musim beredarnya surat resmi dari berbagai penjuru. Isinya meminta atau menggurui. Baik itu permintaan sumbangan uang, tenaga kerja-bhakti, baris-

asyikkan karena ada yang hilang di masa sekarang dan dirindukan pada masa lampau. Keliru bila nostalgia di atas dianggap sebagai romantisme pada kehidupan kampungan masa lampau, sebelum terjadinya Pembangunan, industrialisasi dan modernisasi.

Acara yang saya alami di kampung halaman dulu punya sepuhnya melupakan dimensi kemerdekaan yang bisa dirasakan secara pribadi ini. Secara formal, pemberian grasi serta remisi kepada para narapidana merupakan tradisi yang menyatakan hal ini. Mereka yang paling resmi menderita karena dilucuti kemerdekaannya mendapatkan kelonggaran pemasungan kemerdekaan itu.

Bagaimana dengan kita yang di luar penjara? Dalam konteks ini, tampak betapa memprihatinkan serangkaian pembatalan atau pembubaran acara pertemuan oleh aparat keamanan negara. Dalam beberapa hari belakangan ini saja ada beberapa acara diskusi tentang demokrasi di Yogyakarta yang telah gagal karena tindakan aparat keamanan. Di Surabaya, Sabtu kemarin, sebuah pameran seni-rupa dibatalkan karena sebab yang sama. Berbagai pencekalan orang-orang yang tidak pernah diadili dan dinyatakan sebagai narapidana masih tetap diberlakukan. Dua mahasiswa Semarang saat ini sedang diadili dengan pasal-pasal produk

kolonial.

Mungkin tidak ada masa yang lebih tepat daripada hari-hari pertengahan Agustus ini untuk merenungkan berbagai peraturan yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat proklamasi yang dibacakan "atas nama bangsa Indonesia" itu. Misalnya pencekalan, perizinan bagi diskusi atau pertunjukan kesenian, SIUPP bagi pers, pasal-pasal penghinaan produk kolonial, atau UU Anti-Subversi produk rezim Sukarno.

Sebagai nasionalis yang terjah, Sukarno pernah merasa ragu untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Dia merasa "belum mendapat izin" dari pihak penguasa Jepang. Untunglah Sukarno berani mengikuti desakan kaum muda yang menculiknya untuk melanggar tata krama dan perizinan ala kolonial.

Banyak pemuda Indonesia masa kini yang masih berjiwa terjah. Mereka merasa bersalah ketika ditutup bersalah melanggar atau perizinan bila mengadakan acara diskusi atau pertunjukan. Karena itu mereka hanya berharap izin akan selalu didapat bila diminta. Mereka tidak mempertanyakan apakah peraturan perizinan dan pencekalan seperti itu absah pada tingkat hukum yang lebih tinggi dan berlaku di negeri ini.

Perayaan 17-Agustusan di kampung kami di Jawa Timur, 30 tahun lalu, pasti tidak punya izin. Bukan liar atau ilegal. Tidak ada yang berpikir soal perizinan. Itulah inti kemerdekaan rakyat yang berdaulat di tingkat kampung. \*\*\*

\*) Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW Salatiga